

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab PT Pegadaian Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Karyawan (Studi Kasus Nomor Putusan 01/PHI/2013/PN.DPS)

Yeni Rahmah Dina

Abstrak

Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit untuk masyarakat dengan cara khusus yaitu hukum gadai. Pegadaian merupakan sebuah badan usaha milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Gadai adalah suatu perjanjian riil, kesepakatan untuk memberikan gadai tidak dengan begitu saja melahirkan gadai, melainkan sampai perbuatan pengeluaran benda gadai dari kekuasaan debitur. Salah satu hak gadai yang memberikan jaminan untuk menguasai benda adalah hak resensi, yang merupakan hak dalam memberikan jaminan untuk menguasai bendanya sebelum hutangnya dilunasi. PT Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atas dasar hak capai tidak terlepas dari permasalahan hak lelang. Pada perjanjian gadai apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang ditentukan maka pemegang gadai berhak melakukan lelang barang tersebut. Pada PT Pegadaian terdapat beberapa masalah yang melibatkan beberapa karyawan dan nasabahnya, akibatnya PT Pegadaian mengalami kerugian dalam hal tersebut. Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan di ruang lingkup pegadaian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tanggung jawab, serta penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tanggung jawab penaksir atas nilai taksiran yang telah ditentukan atas objek yang digadaikan. Dan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.

Kata Kunci: Gadai, Pegadaian, Tanggung Jawab

***Reviews Juridical Responsibility of The Directors of PT Pawn Against
Collateral (Number of Case Studies Verdict: 01/PHI/2013/PN.DPS)***

Yeni Rahmah Dina

Abstract

Pawnshop is a non-bank financial institutions that provide credit to the community in a special way the law gadai. Pegadaian is a state-owned enterprises (SOEs) in Indonesia, which is the core business of lending to the services sector on the basis of legal mesyarakat pawn. Pawn is a real treaty, an agreement to give a pledge not to just give birth to a pledge, but rather to act spending pledge objects of power debtors. One liens provide a guarantee for control objects reviewer is right, that is the right to provide a guarantee for control of the object before the debt is settled. PT Pawnshop as one of the financial institutions that provide loans on the basic rights achieved not in spite of the auction rights issues. In the mortgage agreement if the debtor defaults or is unable to redeem the goods until exhausted the prescribed period, the lien holder has the right to auction goods .. At PT Pawn there are several issues that involve several employees and customers, as a result of PT Pawn suffered losses in that respect. In this study raised the issue in the scope of pawnshops. In this study, the author uses the theory of liability, as well as ined on the object mortgaged. And penyelesaian dispute through arbitration the method used in this study normative. The conclusion of this study is the responsibility of the appraiser on the estimated value which has been determaccording to Indonesia's Law No. 30 of 1999 on Arbitration.

Keywords: Pawn, Pawnshops, Responsibility